

RINGKASAN

**AURA AMANDA SYAVIRA NST
NIM 210510359**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
WAJIB PAJAK PERUSAHAAN
(Studi Penelitian Di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak) Sumatera
Utara II)
(Dr. Hadi Iskandar S.H., M.H dan
Muhibuddin S.H., M.Hum)**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan serta mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Langkah-Langkah penegakan hukum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimulai dari langkah-langkah preventif berupa penyuluhan, teguran, serta pemberian sanksi administratif, kemudian dilanjutkan dengan langkah repressif berupa pemeriksaan, penagihan paksa, hingga penyidikan dan pada tahap akhir dapat ditempuh jalur pidana atau ultimum remedium dan Hambatan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak serta kompleksitas struktur keuangan perusahaan. Adapun upaya tersebut adalah terus meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi, dan melakukan publikasi terhadap kasus-kasus perpajakan sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif berupa penyidikan dan dimana sanksi pidana menjadi langkah terakhir setelah upaya administratif tidak berhasil.

Disarankan Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak perusahaan melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang diperluas dengan metode yang lebih inovatif dan berkesinambungan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela wajib pajak perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Wajib Pajak, Perusahaan

SUMMARY

AURA AMANDA SYAVIRA NST
NIM 210510359

**LAW ENFORCEMENT AGAINST
CORPORATE TAXPAYERS**
*(Research Study at the North
Sumatra II Regional Office of the
Directorate General of Taxes.
(Dr. Hadi Iskandar S.H., M.H and
Muhibuddin S.H., M.Hum)*

Any person who intentionally does not pay taxes that have been deducted or collected, thereby causing losses to state revenue, shall be punished with imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 6 (six) years and a fine of at least 2 (two) times the amount of tax owed that has not been paid or is underpaid.

This study aims to determine the law enforcement steps taken by the North Sumatra II Regional Office of the Directorate General of Taxes Against corporate taxpayers and to determine the obstacles and efforts faced in law enforcement against corporate taxpayers at the North Sumatera II Regional Office of the Directorate General of Taxes.

This research method uses a qualitative method with a descriptive, empirical, juridical approach. The research data is sourced from primary and secondary data, and data collection techniques include interview, observation, and documentation.

Law enforcement measures at the North Sumatra II Regional Office of the Directorate General of Taxes are carried out systematically, in stages, and proportionally, in accordance with the General Provisions and Tax Procedures. Starting from preventive measures in the form of counseling, warnings, and the imposition of administrative sanctions, then continued with repressive measures in the form of examinations, forced collection, to investigations and in the final stage can be taken criminal or ultimum remedium and the main obstacles faced in tax law enforcement are the lack of awareness and voluntary compliance from taxpayers and the complexity of the company's financial structure. The efforts are to continue as a form of deterrent effect and public learning. The results obtained from this study are that law enforcement against corporate taxpayers is carried out in stages, starting from a persuasive approach in the form of investigations and where criminal sanctions are the last step after administrative efforts are unsuccessful.

It is recommended that to increase the effectiveness of law enforcement against corporate taxpayers, they conduct education and counseling regarding tax rights and obligations that are expanded with more innovative and sustainable methods so as to increase legal awareness and voluntary compliance of corporate taxpayers in carrying out their tax obligations.

Keywords: Law Enforcement, Taxpayers, Companies